



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PP 39
TRIWULAN III
TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL

**Kementerian
Perindustrian**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kami munajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan nikmat kesehatan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2021 telah selesai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, Oktober 2021

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
I.3. Struktur Organisasi.....	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	8
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	8
B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	10
C. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021.....	14
D. Rencana Aksi	17
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	32
III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran.....	32
III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	35
III.3. Hambatan dan kendala.....	59
III.4. Langkah Tindak Lanjut.....	59
BAB IV. PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal.....	10
Tabel 2 Tabel Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	11
Tabel 3 Program & Kegiatan Inspektorat Jenderal	14
Tabel 4 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal TW III Tahun 2021	17
TABEL 5 Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2021.....	33
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN.....	34
Tabel 7 Progres Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal TW III.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I	4
Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II	5
Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III	6
Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV.....	7

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

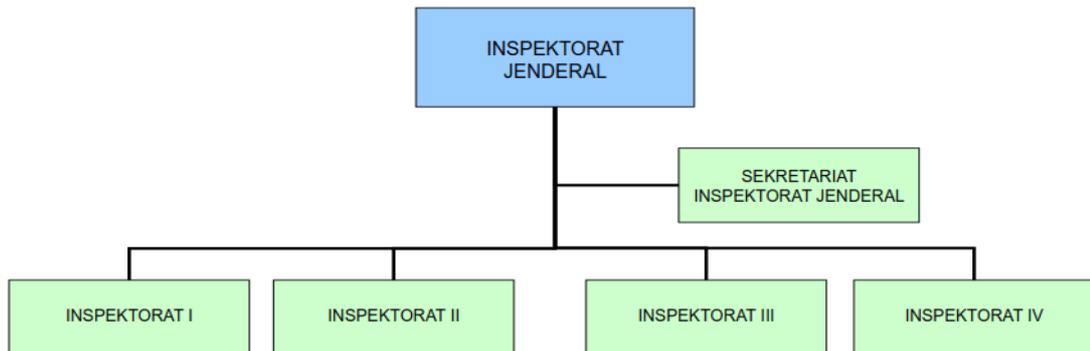
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

2) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari dua unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI). Tata organisasi Inspektorat I meliputi:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

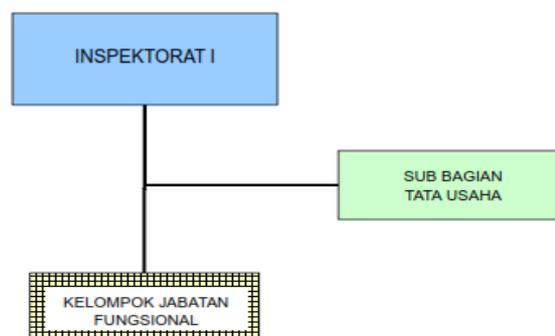
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 orang;
- b) Auditor Madya: 1 orang;
- c) Auditor Muda: 6 orang;
- d) Auditor Pratama: 7 orang.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I

3) Inspektorat II

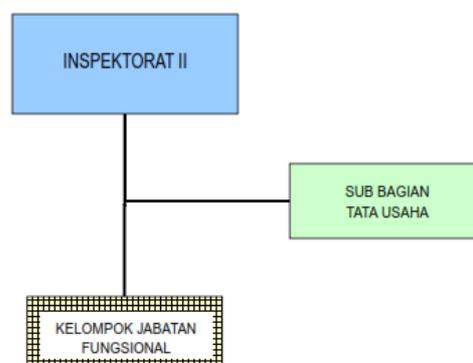
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) orang Inspektur;
- b) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Auditor: 14 orang;
- d) Pelaksana: 2 orang.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II

4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

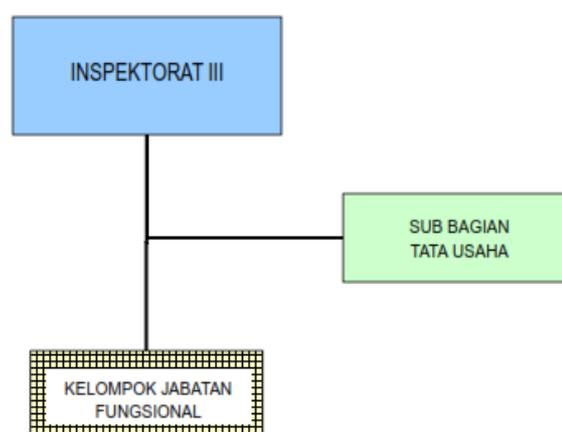
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III

5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

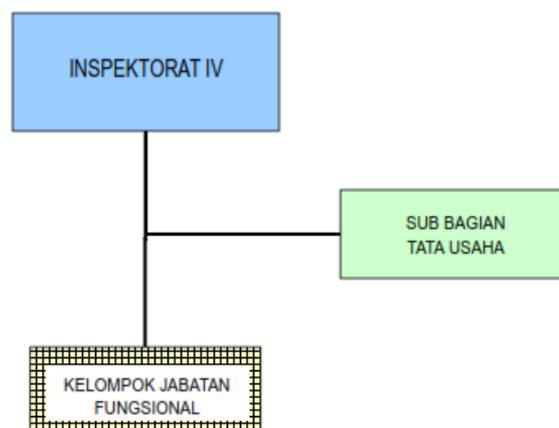
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	71%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3

B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang telah disahkan dalam bentuk perjanjian kinerja yang cara pengukurannya dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 2 Tabel Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus: Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
		3.3 Penerapan TABK	77%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL *)
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	4.1 Sistem informasi pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor	25%	Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor
		4.2 Penyesuaian pedoman/ prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%	Jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat
		4.3 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan, dalam hal jadwal dan komposisi tim, dengan yang tertuang dalam PKPT. Selama penugasan yang tertera di Surat Tugas (ST) masih dilakukan +/-14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT, maka masih dianggap sesuai, jika tidak demikian maka tidak sesuai

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		4.4 Tingkat Perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%	Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk
		4.5 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki
		4.6 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil <i>self assessment</i>
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	5.1 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	Jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan
		5.2 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal
		5.3 Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik Auditor	92%	Dihitung dengan adanya aduan terkait pelanggaran kode etik auditor
		5.4 Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran

C. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3 Program & Kegiatan Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I - Evaluasi Kegiatan Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 121 Laporan - 1 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 13 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
		- Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	- 5 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat III - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III - Evaluasi Kegiatan Inspektorat III 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Laporan - 109 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV - Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Laporan - 17 Laporan - 1 laporan - 1 laporan - 5 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perkantoran - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal - Layanan Sarana Internal - Layanan Pengawasan Internal - Layanan Monitoring & Evaluasi Internal - Bantuan Produk 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Layanan - 1 Layanan -1 unit -2 laporan -13 Laporan -200 Paket

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2021 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp 32,332,974,000.

D. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal. pada triwulan III, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal TW III Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan			
Perspektif Pemangku Kepentingan							
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1.	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4%	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pengawasan oleh Pimpinan (Binwas Bogor, Binwas Jakarta, Binwas Yogyakarta, Binwas Surabaya-Kendal) • Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi • Koordinasi Konsultasi dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Kegiatan Berisiko Tinggi • Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP (Penilaian SAKIP Setjen dan BPSDMI) • Pelaksanaan Pelaporan Keuangan/BMN • Koordinasi Pelaporan Keuangan dan BMN • Reviu RKAKL Setjen dan BSDMI <p>IR II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian SAKIP Eselon II ILMATE, IKMA, BPIPI • Penilaian SAKIP Eselon I • Audit Dana Dekonsentrasi • Evaluasi Hibah BMN 	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan telah sesuai rencana Triwulan III <p>IR II:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dilakukan Reviu LKBMN pada Ditjen IKMA, ILMATE, dan BPIPI; ✓ Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi ✓ Masih berlangsungnya kegiatan Audit Tematik pada Ditjen IKMA (telah dilakukan cek fisik tahap I) <p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian Monev SAKIP Eselon I pada BPP dan Itjen ✓ Audit Internal program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin ✓ Kegiatan Reviu RKAKL terkait penghematan tunjin 	IR I, IR II, IR III, IR IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
			<p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan Layanan Operasional Pimpinan • Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas layanan rumah tangga dan perlengkapan satuan kerja • Koordinasi Penyusunan Program BPPI • Pendampingan Pelaksanaan Audit Eksternal oleh BPK untuk LK 2020 • Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal • Evaluasi SAKIP Es I / Audit Balai Besar dan Baristand & Konsultasi • Koordinasi Pelaksanaxan Pemeriksaan Internal dan Eksternal serta Penguatan Pengawasan di Lingkungan BPPI • Persiapan Konsinyering Pengelolaan PNBPN di lingkungan BPPI • Pelaksanaan Konsinyering Pengelolaan PNBPN 	<p>pada satker cakupan tugas Ir III</p> <p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro ✓ Penyelesaian Hibah BMN Ditjen IKFT ✓ Reviu revisi anggaran Ditjen IKFT <p>Set Itjen:</p> <p>a. Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (verifikasi tahap awal Subbagian PTLHP);</p> <p>b. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dilakukan secara</p>	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
			<p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit P3DN • Audit Kinerja IKFT, P3DN, IA, KPAIL • Cek Fisik IKFT, P3DN, IA, KPAIL <p>Set Itjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan Pendampingan / pengawalan kegiatan berisiko tinggi 	<p>rutin. Tindak Lanjut BPK per Juli mencapai progress 87,55%</p>	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
	2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	IR I: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri • Audit STTT Bandung, SMTI Pontianak, AKA Bogor, SMAK Bogor, STMI Jakarta, SMTI Lampung, BDI Jakarta, APP Jakarta, ATK Yogyakarta, SMTI Yogyakarta, BDI Yogyakarta, Akom Solo, BDI Surabaya, Politeknik Kendal, BDI Denpasar IR II & IV: - IR III: <ul style="list-style-type: none"> • Workshop Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2020 dan Semester I 2021 Set Itjen: <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja , Audit Khusus, Reviu RKAKL 	IR I: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Kinerja dan BMN pada PTKI Medan • Audit Kinerja dan BMN pada BDI Medan • Audit Kinerja dan BMN pada SMK-SMTI Padang • Audit Kinerja dan BMN pada BDI Padang • Audit Kinerja dan BMN pada BDI Denpasar IR II: Kegiatan Audit Tematik pada Ditjen IKMA masih berlangsung Set Itjen: Hingga 30 September 2021, total rekomendasi: 610, tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti (data dapat berubah, karena masih dalam proses pelaksanaan)	IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen
	3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	IR I, II, III, IV: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit khusus • Peningkatan peran pengawasan lainnya • Pembinaan dan koordinasi pengelolaan BMN pada satker cakupan tugas Set Itjen: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan aspek 	IR I II, III, IV, & Set Itjen: ✓ Sampai dengan akhir September, belum ada pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.	IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab	
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan		
				kepegawaian dan hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan klinik konsultasi pengawasan • Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan konsultasi hukum 		
	4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91.5%	IR III: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Perencanaan Kerja dan Anggaran BPPI; <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Revisi Anggaran • Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran • Penyusunan Rencana PNB dan Peraturan Tarif PNB • Bimtek dan sosialisasi bidang penganggaran • Pembinaan satker vertikal • Penyusunan Laporan Akhir ○ Persiapan & pelaksanaan Bimtek ○ Penyusunan Laporan ○ Pelaksanaan Kegiatan pelayanan Operasional Perkantoran ○ Pelaksanaan penyusunan Renstra BSKJI ○ Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan data & informasi, kehumasan, dan pelayanan publik 	IR II <ul style="list-style-type: none"> ○ Telah dilakukan pemantauan tindaklanjut pada Ditjen ILMATE, BPPI, Sidoarjo, dan Dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Riau Set Itjen: Pada tanggal 22 April 2021 dengan Nomor 343/IJ-IND/IV/2021 telah diberikan surat teguran kepada Kepala Bagian PTL & EHP, mengenai capaian tahun 2020, terkait	IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
			<p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Evaluasi SAKIP Es II ○ Pendampingan SAKIP Es I <p>Set Itjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindaklanjut ○ Perbaikan realisasi capaian kinerja berdasarkan surat teguran yang telah di layangkan pada 22 April 2021 terkait capaian indikator kinerja 	<p>indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker tidak tercapai, yaitu 67.57% dari target 91%. Maka dengan adanya surat Teguran ini, capaian kinerja 2021 hingga bulan September 2021, telah terjadi perbaikan dari tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan data per 30 September 2021:</p> <p>Total Rekomendasi seluruh satker: 610</p> <p>Rekomendasi yg telah sesuai: 238</p> <p>Rekomendasi yg belum sesuai: 71</p> <p>Maka realisasi indikator kinerja ini hingga Sept 2021 yaitu :</p>	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
						(238+71)/610 = 51% (Data masih akant berubah sewaktu-waktu karena masih dalam proses pelaksanaan, dan pelaksanaan masih akan dioptimalkan agar target realisasi tercapai)	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Koordinasi PMPRB • Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Mandiri PMPRB, telah dilaksanakan Panel I-III penilaian mandiri PMPRB telah dilaksanakan di TW II. • Hasil PMPRB telah diperoleh indikator kinerja telah tercapai, Cara hitung: Jumlah Indeks 	Set Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
				<p>RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB $(5.61/6.25)*100%=89.76\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penilaian PMPZI Tahun 2021 sampai dengan rapat pleno hasil PMPZI. Hasil rapat pleno mengusulkan 31 satker (14 diusulkan WBBM dan 17 diusulkan WBK). • Kegiatan Penyusunan Berita Acara dan Laporan kegiatan penilaian ZI tahun 2021 masih dalam proses penyusunan. • Survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan Zona Integritas. 	
	2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Penilai dan Tim Pembangun MRI telah dibentuk, Tim Penjamin Kualitas telah dibentuk, namun masih menunggu Surat Resmi. • Akan dilaksanakan PKS Penjaminan Kualitas pada Bulan Oktober. • Penilaian maturitas SPIP baru akan dilaksanakan pada akhir triwulan III dan pada triwulan IV 	IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan			
Perspektif Proses Bisnis Internal							
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1.	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I <p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan sarana dan perlengkapan perkantoran <p>Set Itjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monev pelaksanaan kegiatan Itjen Evaluasi dan pembinaan kegiatan di luar negeri Pelaksanaan penelaahan sejawat 	<p>IR I, IR II, IR III, IR IV:</p> <p>Pelaksanaan pengawasan telah sesuai standar seperti reuiu, audit, kegiatan consulting</p> <p>Setitjen:</p> <p>✓ Belum dilaksanakan penyebaran survey online mengenai Kepuasan Pelanggan Itjen, rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV</p>	IR I, IR II, IR III, IR IV, Set Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
	2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Reviu LAKIP Itjen dan Setitjen • Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 • Penyusunan/ Penyempurnaan Sistem manajemen mutu ISO dan SOP-AP • Penilaian SAKIP Eselon II & Eselon I • Pra Evaluasi Sakip Itjen • Peningkatan kerjasama SDM Pegawai Itjen JPT dan JFU • Peningkatan pengembangan kompetensi pegawai Itjen • Penerbitan Majalah Solusi • Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja • Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Pelaporan Hasil Pengawasan • Penyusunan dan Revisi RKAKL 	✓ Semua kegiatan pendukung telah dilaksanakan. Namun <i>Self-Assessment</i> IACM Level di lingkungan Inspektorat Jenderal belum dilaksanakan.	Set Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
	3. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	Koordinasi Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi	IR II: ✓ Audit Tematik Ditjen IKMA masih dalam proses Setitjen: - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebagai pendukung kegiatan audit rutin dilaksanakan. - Pengadaan laptop di bulan Juni sebanyak 20 Unit ASUS Vivobook K14 dan di bulan September 1 Unit ASUS ROG Zephyrus G14.	Ir I, II, III, IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
Learn & Growth Perspective					
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Sistem Informasi Pengawasan untuk Pelaksanaan Audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor	25%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan Informasi Pengawasan ○ Pemeliharaan Website inspektorat Jenderal ○ Pengelolaan Media Informasi pengawasan ○ Penerbitan Majalah Solusi ○ Aplikasi Website Itjen dapat dihidupkan kembali jika ada pembayaran dimuka 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan informasi internal masih dalam tahap pengembangan ○ Pengembangan informasi seputar kegiatan pengawasan dan pengawalan Inspektorat Jenderal melalui media sosial (Instagram dan media massa online) 	Sekretariat Inspektorat Jenderal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	2. Penyesuaian Pedoman/Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	55%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Itjen ○ Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan ○ Penyusunan Peta Proses Bisnis Itjen ○ Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Itjen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pada Bulan Juli 2021, 18 SOP Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi telah di reviu ○ Pada Bulan Agustus 2021, Penyusunan konsep SOP PTLHP dengan menyesuaikan pada peraturan Inspektur Jenderal Nomor 176 Tahun 2019 (SOP Terakhir belum relevan dengan perirjen); 	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	3. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	IR I: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Penyusunan Dokumen PKPT IR II: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran ○ Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas IR III: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran ○ Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabiitas ○ Peningkatan Hubungan Antar Lembaga/Instansi/satker terkait IR IV: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelesaian Hibah BMN 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan monitoring PKPT setiap bulannya dengan hasil Sebagian besar kegiatan tidak sesuai dengan rencana PKPT yang telah dibuat diawal tahun. - Pelaksanaan pengawasan masih berjalan disesuaikan dengan situasi dan kondisi; - Penyusunan Jakwas 2022 masih dalam tahap perencanaan; - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan selesai 	Ir I, II, III, IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan			
				Setitjen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Program Pengawasan ○ Bimbingan dan Pengawasan Aspek Program di Lingkungan Kemenperin ○ Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi ○ Perbaikan Peraturan Kinerja 	dilaksanakan		
		4.	Tingkat Perolehan Data dan Informasi Pengawasan yang Memadai	90%	Pemutakhiran Data dan Informasi	Sampai dengan TW III, perolehan data dan informasi pengawasan dapat diperoleh sebesar 100%. Perolehan data dan informasi pengawasan di tahun 2021 dilakukan melalui E-pesan dan media <i>Whatsapp</i>	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Arsiparis)
		5.	Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan Perannya	90%	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat. Berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian, Kesesuaian Peran pengawasan Auditor dengan sertifikasi terakhir yang dimiliki telah sesuai 100%	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan	
	6. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penilaian SAKIP Eselon I ○ Koordinasi Analisis & Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan ○ Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait Isu-isu aktual bidang industri 	<p>Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen telah mencapai target, yaitu 91% Cara hitung: nilai RB Itjen (komponen pengungkit) = 33,03 dari total nilai 36,3. maka: $33,02/36,3 = 0,91 \times 100\% = 91$</p>	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan di kantor sendiri (PKS) atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan 	<p>PKS yang telah dilaksanakan adalah 4 Pelatihan (Januari-September), diklat substansi yg telah diikuti sertakan 7. Maka Capaian hingga September 2021: $4/7 \times 100\% = 57.1\%$ → 4 PKS, yaitu Penilaian Mandiri SPIP/MRI, PKS penilaian SAKIP tahun 2020, PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP, PKS Overview Manajemen Resiko Indeks</p>	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)
	2. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Pengembangan SDM ○ Pedoman dan kenaikan pangkat, diklat-diklat ○ Keikutsertaan diklat pengembangan SDM Itjen ○ Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA 	<p>Kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan TW III, Hingga September 2021, terdapat 56 orang pegawai yang mendapatkan diklat kompetensi dari total 106 APIP. $56/106 \times 100\% = 53\%$</p>	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN III		Penanggung Jawab	
			Rencana Kegiatan dengan target 75%	Realisasi Kegiatan		
				<ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Itjen ○ Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 		
	3. Tingkat Kepatuhan terhadap Kode Etik Auditor	92%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan, dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan 	Telah disediakan informasi tentang hukum yang dapat diakses melalui hukumonline.com serta pencetakan informasi hukum dan referensi pengawasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)	
	4. Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan Fasilitas Perkantoran ○ Pembayaran Gaji dan Tunjangan ○ Honorarium Operasional ○ Koordinasi dan layanan pimpinan ○ Pelayanan Umum & Rapat Kedinasan ○ Koordinasi dan sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN ○ Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan ○ Pemeliharaan Sarana dan prasarana operasional kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembayaran gaji dan tunjangan yang rutin setiap bulan; ○ Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan; dan ○ Penyusunan Laporan Perbendaharaan tiap bulan dan Laporan Barang dan Jasa Semester I Tahun 2021 	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian, Program, dan Keuangan)	

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak lima (5) kali. Pagu awal sebesar Rp 40.643.630.000. Revisi pertama dan kedua dilakukan pada triwulan I dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal penghematan belanja Kementerian/Lembaga. Dengan adanya penghematan sekitar Rp 2,312,373,000 yang berasal dari tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13, maka total pagu Inspektorat Jenderal berubah menjadi Rp 37,331,257,000. Kemudian ada revisi ke-4 pada tanggal 18 Agustus 2021 menjadi Rp 34,788,232,000. Kemudian pada tanggal 15 September 2021 terdapat revisi DIPA ke-5, maka pagu anggaran Inspektorat Jenderal menjadi Rp 32,332,974,000.

Kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan III ini telah terlaksana dengan cukup baik. Namun, hingga akhir Juli ini kondisi pandemi Covid-19 memburuk maka dilakukan PPKM darurat di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang berdampak kepada komposisi pegawai yang *work from office* (WFO) hanya 25% dan diberlakukan hingga akhir bulan September 2021.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan III Tahun 2021 (Juli - September) mencapai Rp 6,571,666,042,- 20.32 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 32,332,974,000,-.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW III tahun 2021 :

Tabel 5 Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2021

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan III		Realisasi s.d. Triwulan III		Sisa Anggaran s.d. Triwulan III	
		Keuangan (Rp.)	%	Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp.)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	1,530,000,000	317,928,583	20.77	1,193,122,086	77.98	336,877,914	22.02
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	1,430,000,000	261,384,272	18.27	956,495,449	66.89	473,504,551	33.11
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	1,430,000,000	348,858,482	24.39	950,321,963	66.46	479,678,037	33.54
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1,430,000,000	245,502,472	17.16	967,307,656	67.64	462,692,344	32.36
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	26,512,974,000	5,397,992,233	20.35	18,057,173,874	68.11	8,455,800,126	31.89
TOTAL	32,332,974,000	6,571,666,042	20.32	22,124,421,028	68.43	10,208,552,972	31.57

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 30 Juni 2021 & 30 September 2021

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	17,467,091,000	7,290,580,375	41.74	10,176,510,626
2	52 Belanja Barang	19,274,166,000	7,674,629,632	39.82	11,599,536,368
3	53 Belanja Modal	590,000,000	587,544,980	99.58	2,455,020
Jumlah		37,331,257,000	15,552,754,986	41.66	21,778,502,014
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto (data SPAN per 30 Juni 2021)</i>					

Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 30 September 2021

	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	15,467,091,000	10,984,146,879	71.02	4,482,944,121
2	52 Belanja Barang	16,218,343,000	7,674,629,632	65.07	5,665,613,831
3	53 Belanja Modal	647,540,000	587,544,980	90.73	59,995,020
Jumlah		32,332,974,000	22,124,421,028	68.43	10,208,552,972
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>					

Berdasarkan perbandingan data diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perubahan pagu pada bulan Juni 2021 ke September 2021 sebesar Rp 4,998,283,000 hal ini karena adanya realokasi bantuan oksigen dan blokir mandiri yang melatarbelakangi revisi DIPA keempat pada tanggal 18 Agustus 2021 dan karena adanya penghapusan blokir pada revisi kelima pada tanggal 15 September 2021, sesuai Surat Pengesahan Nomor SP DIPA-019.06.1.247885/2021. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran terdapat kenaikan sebesar 26.77% dari Triwulan II, dengan komposisi realisasi tertinggi yaitu pada komponen belanja modal, yaitu hampir 100% telah terealisasi.

III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 diperoleh melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang didukung sepenuhnya oleh anggaran yang telah ditetapkan setelah revisi kelima, yaitu Rp 32,332,974,000.

Dengan adanya *New Normal*, kegiatan Inspektorat Jenderal yang dapat terlaksana pada Triwulan III (Juli-September) yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan, Pembinaan, dan Pengawalan selama Triwulan III Tahun 2021

a. Inspektorat I:

- ✓ Melakukan *Desk Reviu* pelaksanaan kegiatan beresiko (konstruksi, Mesin/peralatan, Diklat 3in1, Pengadaan tanah dan jasa konsultasi) tanggal 5 – 16 Juli 2021
- ✓ Reviu LK/BMN semester I Tahun Anggaran 2021 pada BPSDMI dan Setjen tanggal 19 Juli – 20 Agustus 2021;
- ✓ Pengawasan bantuan Masker KPC-PEN dari Kementerian Perindustrian;
- ✓ Koordinator Tim Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Perindustrian pada satuan kerja Jakarta tanggal 1 Juli – 2 Juli 2021;
- ✓ Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pembangunan gedung PIDI 4.0 tanggal 20 Juli – 23 Juli 2021
- ✓ Pengujian lapangan implementasi instruksi Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2021 di PT Linde Indonesia tanggal 16 Juli -18 Juli 2021;
- ✓ Pengawasan dan pengawalan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2021 tentang produk oksigen sebagai komoditas strategi industri dalam masa kedaruratan kesehatan Covid-19 tanggal 16 Juli – 30 Juli 2021;
- ✓ Pengujian lapangan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2021 pada PT Air Liquide Indonesia tanggal 16 Juli – 1 Agustus 2021;
- ✓ Melakukan pemantauan dan reviu rencana pengurangan dan pembangunan pagar Poltek IFPK Kendal tanggal 5-7 Agustus 2021;
- ✓ Pemantauan pekerjaan pembangunan Gedung Politeknik APP tanggal 9 Agustus-16 Agustus 2021;

- ✓ Pemantauan pekerjaan pembangunan Gedung PIDI 4.0 Permata Hijau tanggal 9 Agustus-16 Agustus 2021;
- ✓ Pengawasan Program Pembangunan Gedung pada AKOM Solo dan pemantauan bantuan masker di Solo tanggal 18 Agustus-21 Agustus 2021;
- ✓ Audit pengelolaan keuangan/BMN dan penggunaan akun Covid-19 pada Politeknik Industri Logam Morowali tanggal 30 Agustus-3 September 2021;
- ✓ Audit pengelolaan keuangan/BMN dan penggunaan akun Covid-19 pada Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng tanggal 30 September 2021;
- ✓ Reviu Perencanaan Program dan Anggaran TA 2021 pada BPSDMI tanggal 30 Agustus-1 Oktober 2021;
- ✓ Pengawasan progress pembangunan Gedung AKOM Solo tanggal 3-4 Agustus 2021;
- ✓ Reviu revisi anggaran pada BPSDMI tanggal 18 Agustus-20 Agustus 2021;
- ✓ Peran APIP K/L dalam pengawasan atas Perencanaan dan Penganggaran tanggal 30 Agustus 2021;
- ✓ Audit kinerja dan pengelolaan keuangan pada BDI Padang;
- ✓ Audit kinerja dan pengelolaan keuangan/BMN dan penggunaan akun Covid-19 pada SK-SMTI Banda Aceh;
- ✓ Monitoring bantuan masker pada BPSDMI;
- ✓ Mengikuti layanan konsultasi (*Coaching Clinic* secara online) dalam rangka Rakernas Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021;
- ✓ Pengawasan seleksi tes CPNS di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- ✓ Reviu revisi DIPA Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat Jenderal;

b. Inspektorat II:

- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- ✓ Melakukan Reviu LKBMN Semester I TA. 2021 pada Direktorat jenderal IKMA, ILMATE, BPIPI Sidoarjo

- ✓ Melakukan Reviu RKA-K/L Direktorat Jenderal IKMA dan BPIPI Sidoarjo;
- ✓ Reviu RKAKL Pagu Indikatif Ditjen ILMATE TA 2022;
- ✓ Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- ✓ Reviu RKAKL Pagu Indikatif Ditjen ILMATE TA 2022 Tahap II;
- ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan Implementasi PMK 119/PMK.02/2020 dan Biaya Transportasi yang belum diatur dalam PMK 190/PMK.02/2020;
- ✓ Sosialisasi Operasionalisasi dan Mobilitas Kegiatan Industri dan Kawasan Industri;
- ✓ Pengawasan Pelaksanaan IOMKI dan Pemenuhan Kebutuhan Oksigen pada Masa PPKM Darurat di Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
- ✓ Menghadiri Rapat Penelaahan atas Usulan pemberian Insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) pada Sektor Industri;
- ✓ Menghadiri Sosialisasi BMDTP Covid-19 Tahun 2021;
- ✓ Menghadiri Pembahasan Draft Peraturan Pengelola Bersama CEIR (pembahasan matrik pembagian tugas dan wewenang serta lingkup organisasi dari pengelolaan Bersama CEIR);
- ✓ Pengawasan Ketersediaan Oksigen Medis;
- ✓ Menghadiri Pembahasan kesesuaian prosedur pemberian bantuan implementasi solusi teknologi;
- ✓ Melakukan Revisi Usulan Anggaran TA 2020 pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
- ✓ Menghadiri Sosialisasi Updating IOMKI;
- ✓ Melakukan kunjungan Industri ke PT AM/NS Indonesia; dan
- ✓ Menghadiri Rapat Tim Teknis Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM tahun 2021 pada Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan;

- ✓ Menghadiri Rapat Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
- ✓ Menghadiri Undangan Monev Restrukturisasi Mesin/Peralatan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Tahun 2020;
- ✓ Menghadiri Rapat Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Tabung Oksigen, Oksigen Konsentrator dan Oksigen Generator Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
- ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan Lanjutan Draft Perjanjian Hibah CEIR pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
- ✓ Reviu usulan TA 2022 pada Ditjen IKMA;
- ✓ Melakukan Reviu Refocusing Anggaran Ditjen IKMA TA 2021;
- ✓ Melakukan Reviu LKBMN Semester I TA. 2021 pada Direktorat jenderal ILMATE;
- ✓ Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- ✓ Reviu RKAKL Pagu Indikatif Ditjen ILMATE TA 2022 Tahap II;
- ✓ Reviu Revisi Realokasi Anggaran Ditjen ILMATE TA 2021 Tahap II;
- ✓ Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;
- ✓ Monitoring pada Direktorat Jenderal ILMATE dalam rangka Pemantauan Kepatuhan Industri terhadap Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Oksigen sebagai Komoditas Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan COVID 19;
- ✓ Verifikasi Lapangan dalam rangka Pemantauan Kepatuhan Industri terhadap Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Oksigen sebagai Komoditas Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan COVID 19;
- ✓ Penyelesaian Permohonan Tanggapan Terhadap Draft Perjanjian Hibah CEIR;
- ✓ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Dekonsentrasi Pada Disperindag Provinsi NTT;
- ✓ Koordinasi Pemantauan IOMKI dan Evaluasi Harga Gas Bumi Tertentu pada

PT Krakatau Steel;

- ✓ Menghadiri Rapat Konsultasi Direktorat Industri Logam Ditjen ILMATE dalam Rangka Pelaksanaan Belanja TA 2021;
- ✓ Menghadiri Rapat Program Vaksinasi Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil dan Menengah;
- ✓ Menghadiri Pembahasan BA Penelitian dan Penilaian BMN untuk PMPP kepada PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XIV;
- ✓ Menghadiri Rapat Persiapan Penelitian dan Reviu Usulan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika TA. 2021;
- ✓ Menghadiri Rapat Progres Pengadaan Tabung Oksigen, Oksigen Konsentrator dan Oksigen Generator melalui mekanisme APBN Tahun Anggaran 2021;
- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Teknis CEIR;
- ✓ Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Monev DAK;
- ✓ Menghadiri Rapat Penyelesaian Permohonan Tanggapan Terhadap Draft Perjanjian Hibah CEIR;
- ✓ Menghadiri Pemaparan dan Diskusi dengan BPK Terkait Program Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- ✓ Menghadiri Rapat Finalisasi Draft Perjanjian Hibah dan BAST CEIR;
- ✓ Menghadiri Rapat Perjanjian Hibah dan BAST CEIR;
- ✓ Menghadiri Diskusi terkait Progress pembangunan Smelter;
- ✓ Koordinasi Ujicoba Sektor Industri Esensial Beroperasi Penuh;
- ✓ Menghadiri Rapat Koordinasi Operasi Sektor Industri Esensial;
- ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan rumusan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target, serta Matriks Keterkaitan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan Pending Matters Hibah CEIR;
- ✓ Menghadiri Rapat Penyusunan Tim Penilai Pemanfaatan BMN;
- ✓ Menghadiri Peluncuran Program Fasilitasi Halal;
- ✓ Menghadiri *Kick Off* Sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Industri;
- ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Revisi Renstra Kementerian

Perindustrian Tahun 2020-2024;

- ✓ Menghadiri Rapat Lanjutan Monev Restrukturisasi Mesin/Peralatan Direktorat Jenderal IKMA;
- ✓ Menghadiri Rapat Teknis Kegiatan Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM Tahun 2020;
- ✓ Menghadiri Rapat Reviu APIP dan Biro Perencanaan terkait Revisi DIPA Pemenuhan Refocusing anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021;
- ✓ Melakukan Audit Tematik di Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 dan semester I TA. 20210 dilaksanakan pada tanggal 1 September–29 Oktober 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1171/IJ-IND/ST/VIII/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di BPIPI Sidoarjo dilaksanakan pada tanggal 20-24 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1273/IJ-IND/ST/IX/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kota Denpasar dilaksanakan pada tanggal 21-24 September 2021 berdasarkan Surat Tugas 1276/IJ-IND/ST/IX/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kabupaten Banyumas dilaksanakan pada tanggal 22-24 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1279/IJ-IND/ST/IX/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada tanggal 22-24 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1280/IJ-IND/ST/IX/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kota Semarang dan Kabupaten Batang dilaksanakan pada tanggal 22-24 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1283/IJ-IND/ST/IX/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kota Magelang dilaksanakan pada tanggal 22-24 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1284/IJ-IND/ST/IX/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kota Magelang dilaksanakan pada tanggal 22-24 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1287/IJ-IND/ST/IX/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA

- TA. 2021 di Kabupaten Gresik dilaksanakan pada tanggal 27-30 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1285/IJ-IND/ST/IX/2021
- ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kabupaten Pinrang dilaksanakan pada tanggal 27-30 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1286/IJ-IND/ST/IX/2021;
 - ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kabupaten Klaten, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 28 September - 1 Oktober 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1287/IJ-IND/ST/IX//2021;
 - ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kabupaten Boyolali dilaksanakan pada tanggal 28 September – 1 Oktober 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1288/IJ-IND/ST/IX//2021;
 - ✓ Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Tematik Direktorat Jenderal IKMA TA. 2021 di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan pada tanggal 28 September- 1 Oktober 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1289/IJ-IND/ST/IX//2021;
 - ✓ (Kegiatan Consulting) Melakukan Reviu Revisi DIPA Pemuan Refocusing Anggaran Kementerian Perindustrian TA. 2021 oleh Direktorat Jenderal IKMA dilaksanakan pada tanggal 5-12 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1219/IJ-IND/ST/IX/202;
 - ✓ Melakukan Reviu Revisi Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE TA. 2021 dilaksanakan pada tanggal 14-20 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1255/IJ-IND/ST/IX/2021
 - ✓ Menghadiri Rapat pelaksanaan Bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Porang di Kabupaten Madiun pada tanggal 6 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1235/IJ-IND/ST/IX/2021
 - ✓ Menjadi Narasumber Bimtek Penilaian Maturitas SPIP pada tanggal 6-8 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1220/IJ-IND/ST/IX/2021
 - ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian SPIP pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1241/IJ-IND/ST/IX/2021
 - ✓ Menghadiri Penyampaian Hasil Pengawasan Reviu PBJ Triwulan I dan II Tahun 2021 dan Undangan Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Reviu PBJ Triwulan III Tahun 2021 pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1245/IJ-IND/ST/IX/2021
 - ✓ Menghadiri Rapat Perjanjian Hibah dan BAST CEIR pada tanggal 15

- September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1269/IJ-IND/ST/IX/2021;
- ✓ Menghadiri Rapat Kegiatan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal IKM Logam, Mesin, Elektronika dan alat Angkut pada tanggal 16 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1258/IJ-IND/ST/IX/2021;
 - ✓ Melakukan Cek Fisik Mesin dan Peralatan Kegiatan Restrukturisasi Permesinan IKM pada tanggal 20-22 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1274/IJ-IND/ST/IX/2021;
 - ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan Tata Cara Pengisian Kertas Kerja SPIP pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1301/IJ-IND/ST/IX/2021;
 - ✓ Menghadiri Undangan Rapat Tim Teknis pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1308/IJ-IND/ST/IX/2021;
 - ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan Hibah Alat Kesehatan SPIP pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1323/IJ-IND/ST/IX/2021;
 - ✓ Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Direktorat Jenderal IKMA pada tanggal 22-24 September 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 1305/IJ-IND/ST/IX/2021.

c. Inspektorat III:

- ✓ Reviu RKA-K/L pemotongan anggaran dalam rangka pemberian bantuan oksigen, tabung oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator dan oksigen generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional BSKJI (Beserta Unit Vertikalnya), Itjen dan Pusdatin;
- ✓ Monitoring dan pengawasan implementasi IOMKI pada satker Pusdatin;
- ✓ Pengawasan dan Pengawasan pada perusahaan Industri dalam rangka pemantauan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 guna penyediaan bantuan oksigen dalam masa kedaruratan Covid-19;
- ✓ Reviu LKBMN Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Satker BBBBT, BBLM, BBK, BBT, BBPK, BBTPI, BBKB, BBKPP, Baristand Industri Palembang, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Surabaya, BSI dan BBKK
- ✓ Reviu LK-BMN Kementerian Perindustrian;
- ✓ Audit program dan kegiatan cakupan Satker IR III.
- ✓ Reviu RKA-K/L pagu indikatif 2022 Inspektorat Jenderal;

- ✓ Reviu LKBMN Semester I TA 2021 pada BSI, BBKK, BBIA, Baristand Padang, Baristand Bandar Lampung, BBIHP Makassar, Baristand Medan, Baristand Samarinda, Baristand Ambon dan Baristand Manado;
- ✓ Pengawasan dan pemantauan implementasi IOMKI pada Satker BSKJI dan Pusdatin;
- ✓ Reviu revisi anggaran terkait pengadaan peralatan oksigen, IMEI pada Satker BSKJI, Itjen dan Pusdatin;
- ✓ Pengawasan SPPT-SNI pada unit pelaksana teknis BSKJI;
- ✓ Pengawasan program dan kegiatan beresiko tinggi pada satker BBK, BBBBT, BBIHP Makasar, BBIA Bogor, BBT, BBKKP, BBKB;
- ✓ Pengawasan kinerja Triwulan II pada satker BSKJI Pusat, Pusdatin dan Itjen;
- ✓ Audit program dan kegiatan TA 2020 pada satker Baristand Banjarbaru;
- ✓ Pengawasan pelaksanaan Zona Integritas dan persiapan WBBM pada satker BBBBT, Baristand Palembang dan BBT;
- ✓ Pengawasan penilaian Maturitas SPIP terintegrasi pada satker BBT, BBK, BBLM, BBPK.

d. Inspektorat IV:

- ✓ Kunjungan dalam rangka audit Ditjen IKFT;
- ✓ Pengujian lapangan dalam rangka audit kinerja Ditjen IKFT ke PT Kalbe Farma;
- ✓ Pengujian lapangan implementasi Instruksi Menteri Perindustrian No 1 tahun 2021 di PT Air Liquide Indonesia;
- ✓ Pemantauan vaksinasi Industri dan implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021(IOMKI) Ditjen Industri Agro;
- ✓ Audit Kinerja Ditjen IKFT TA 2020 (Lanjutan);
- ✓ Pendampingan BPKP dalam rangka reviu Tata Kelola Proyek Strategi Nasional Pembangunan Kawasan Industri Triwulan II Tahun 2021;
- ✓ Pengawasan penerbitan dan pelaksanaan IOMKI serta penyediaan oksigen medis selama PPKM darurat pada satker cakupan tugas Inspektorat IV;
- ✓ Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Temuan pemeriksaan hasil BPK terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020;

- ✓ Pengawasan dan pengawalan Industri Oxygen Kesehatan Covid-19;
- ✓ Webinar Kemenko Perekonomian Praktik Terbaik Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;
- ✓ Penyusunan laporan pengawalan pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II tahun 2021 pada Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Pusat P3DN, Ditjen KPAIL, Ditjen Agro, Ditjen IKFT;
- ✓ Reviu Usulan RKA-K/L berdasarkan Pagu Indikatif TA 2020 Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
- ✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2021 pada Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen KPAIL;
- ✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I tahun 2021 pada Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
- ✓ Reviu RKA-KL Ditjen IA dan Ditjen IKFT;
- ✓ Rapat Koordinasi Penyediaan Data Survey Penilaian Integritas;
- ✓ Reviu Revisi Realokasi Pagu TA 2021 Ditjen KPAIL.
- ✓ Pemantauan Vaksinasi Industri dan implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021 (IOMKI) PT Nippon Indosari Corpindo & PT Prakarsa Alam Segar tanggal 6 – 7 Agustus 2021;
- ✓ Kunjungan ke Industri di Tangerang dalam rangka pengawalan Surat Edaran Menperin No 3 Tahun 2021;
- ✓ Pemantauan Implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021 (IOMKI) dan kesiapan Industri menghadapi Pandemi Ditjen Industri Agro di PT Sampoerna;
- ✓ Monitoring Uji Coba Industri Essensial beroperasi 100% Ditjen Industri Agro;
- ✓ Pendampingan dan pengawalan Uji Coba Industri Essensial beroperasi 100% di Cirebon, Pati, Kudus;
- ✓ Pendampingan dan pengawalan Uji Coba Industri Essensial beroperasi 100% di Pasuruan dan Malang;
- ✓ Pendampingan dan pengawalan Uji Coba Industri Essensial beroperasi 100% di Madiun dan Surabaya;
- ✓ Reviu revisi DIPA TA 2021 terkait pengadaan oksigen Ditjen IKFT tanggal 2 – 5 Agustus 2021;
- ✓ Reviu Revisi DIPA TA 2021 Pusat PIH terkait Realokasi Anggaran Dalam

Rangka Pemberian Bantuan Oksigen, Tabung Oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator dan Oksigen Generator, Program Pengendalian IMEI Nasional, Program Vaksinasi Sektor Industri, Fasilitas I tanggal 2 Agustus – 9 Agustus 2021;

- ✓ Pendampingan pemeriksaan kinerja BPK terkait kegiatan sertifikasi TKDN tanggal 4 – 17 Agustus 2021;
- ✓ Mendampingi pimpinan koordinasi pemantauan IOMKI dan evaluasi Harga Gas Bui Tertentu pada PT Krakatau Steel tanggal 12 Agustus 2021;
- ✓ Reviu revisi DIPA TA 2021 dalam rangka pemberian bantuan oksigen, program pengendalian IMEI, Program Vaksinasi dan Fasilitas Isolasi Mandiri Terpusat Ditjen Industri Agro tanggal 3 Agustus – 6 Agustus 2021;
- ✓ Reviu anggaran dalam rangka buka blokir TA 2021 Ditjen IKFT;
- ✓ Pendampingan penyusunan peta resiko Direktorat Jenderal Industri Agro, Ditjen IKFT, Ditjen KPAIL, Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
- ✓ Reviu revisi anggaran pada BPSDMI;
- ✓ Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan mesin dan/atau peralatan pembuatan obat tradisional (hibah mesin/peralatan dalam rangka revitalisasi industri obat tradisional TA 2020);
- ✓ Reviu revisi DIPA pemenuhan refocusing anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021 Ditjen Industri Agro tanggal 27 Agustus – 31 Agustus 2021;
- ✓ Pengawasan program restrukturisasi mesin/peralatan pada industry penyempurnaan kain dan industri percetakan kain sesuai Permenperin no 18 tahun 2021;
- ✓ Penilaian Kembali BMN di pabrik gula PT Perkebunan Nusantara II Deli Serdang;
- ✓ Pengawasan dan pelaksanaan program kegiatan Direktorat ASDIPI Tahun 2021;
- ✓ Pengawasan pemetaan kebutuhan garam industry selain dari impor;
- ✓ Pengawasan verifikasi kebutuhan bahan baku jagung dalam industry makanan;
- ✓ Pengawasan kegiatan verifikasi kebutuhan komoditas perikanan sebagai bahan baku dan bahan penolong;

- ✓ Penyusunan RSNI Sistem Harmonisasi Global Ditjen IKFT;
- ✓ Pengawasan pelaksanaan industri halal;
- ✓ Pendampingan dan pengawasan kegiatan percepatan industry tembakau;
- ✓ Melakukan cek fisik dalam rangka audit tematik Direktorat Jenderal IKMA TA 2021;
- ✓ Penilaian BMN PMPP Ditjen Industri Agro di Takalar Sulsel;
- ✓ Sampling reviu kegiatan pengadaan masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro Ditjen Industri Agro;
- ✓ Pengawasan evaluasi implementasi sertifikasi TKDN produk farmasi Ditjen IKFT;
- ✓ Reviu Revisi Ditjen KPAIL;
- ✓ Reviu revisi DIPA dalam rangka pemenuhan refocusing anggaran 2021 Ditjen IKFT;
- ✓ Reviu revisi DIPA dalam rangka pemenuhan refocusing anggaran 2021 Ditjen Industri Agro;
- ✓ Audit Kinerja dirjen KPAIL tahun 2020;
- ✓ Reviu revisi DIPA dalam rangka pemenuhan refocusing anggaran 2021 P3DN;
- ✓ Monev pemanfaatan bantuan mesin dan/alat dalam rangka revitalisasi industry obat tradisional TA 2018 Sukoharjo dan Bantul;
- ✓ Reviu revisi anggaran pada Ditjen Industri Agro
- ✓ Reviu revisi anggaran pada PPIH;

2. Penyusunan Anggaran Tahun 2022

- Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022, adapun pagu indikatif Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 40,643,630,000, - dengan rincian per Eselon II sebagai berikut:

Unit Eselon II	Anggaran
Inspektorat I	2,108,753,000
Inspektorat II	2,050,000,000
Inspektorat III	2,050,000,000
Inspektorat IV	2,050,000,000
Sekretariat Inspektorat Jenderal	32,384,877,000

3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Reviu Renstra dan Reviu Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 telah dilaksanakan. Namun, revisi Renstra Inspektorat Jenderal belum dapat disahkan karena menunggu revisi Renstra Kementerian Perindustrian, yang saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Bappenas.
- 2) Melaksanakan evaluasi capaian output Inspektorat secara manual untuk dikirimkan ke bagian keuangan Inspektorat Jenderal
- 3) Melaksanakan evaluasi capaian output Inspektorat Jenderal melalui aplikasi SMART DJA, dan E-Monev Bappenas.
- 4) Penyelesaian laporan evaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal rutin setiap bulan
- 5) Koordinasi fasilitasi penilaian MRI di Lingkungan Kementerian Perindustrian, melalui kegiatan: pembentukan tim pembangun dan tim penilai di lingkungan Inspektorat Jenderal, koordinasi pembentukan tim penjamin kualitas dan tim penilai di lingkungan Kementerian Perindustrian, Koordinasi dan sosialisasi pengisian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) serta tata cara penjaminan kualitas.

4. Dokumen-Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal

Dokumen perencanaan yang telah diselesaikan pada triwulan III ini antara lain:

- a) Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2021
- b) Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2021
- c) Dokumen RKA-KL Inspektorat Jenderal Tahun 2021

5. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil monitoring kegiatan pada Triwulan II, capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal, masih sebesar 37% dari target indikator kinerja 91.5%. Dengan realisasi indikator kinerja yang masih jauh dari target, maka pada Triwulan III ini, pimpinan mengarahkan untuk melakukan kegiatan yang mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut oleh satker, antara lain:

- ✓ Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas saldo temuan hasil pengawasan internal;

- ✓ Temu teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada Seluruh Unit Eselon I Kementerian Perindustrian yang telah dilaksanakan pada tanggal 14-23 September 2021.
- ✓ Sosialisasi Pra Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Unit Dekonsentrasi dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Jenderal Pemerintah Daerah telah selesai dilaksanakan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan diatas, realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker” pada triwulan III mencapai 51%, dengan rincian data sebagai berikut: Total Rekomendasi hingga 30 September 2021 yaitu 610. Tindak lanjut yang sesuai rekomendasi sebanyak 238, tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 71, serta rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 301.

6. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal

Dalam rangka mendukung tindak lanjut pengawasan eksternal, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (verifikasi tahap awal Subbagian PTLHP);
- b. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dilakukan secara rutin. Tindak Lanjut BPK pada Bulan Juli mencapai progress 87,55% (penyerahan dokumen TL dari BPK ke bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan per Juli 2021).

Kegiatan diatas merupakan pendukung salah satu indikator kinerja dalam renstra yaitu “Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal” telah tercapai sebesar 0,033% (target indikator telah tercapai) diperoleh dari temuan BPK Rp 653.625.627,60 dibagi realisasi anggaran Kemenperin TA 2020 Rp 1.975.729.108.365;

7. Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan

Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan yang dilaksanakan selama Triwulan III (Juli-September) adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penilaian PMPZI Tahun 2021 sampai dengan rapat pleno hasil PMPZI. Hasil rapat pleno mengusulkan 31 satker (14 diusulkan

WBBM dan 17 diusulkan WBK). Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Satuan Kerja yang diusulkan Memperoleh Predikat WBBM	Satuan Kerja yang diusulkan Memperoleh Predikat WBK
1. Baristand Industri Banjarbaru	1. Baristand Industri Palembang
2. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar	2. Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung
3. SMK-SMTI Pontianak	3. SMK-SMTI Banda Aceh
4. Politeknik STTT Bandung	4. SMK-SMAK Makassar
5. Balai Besar Tekstil Bandung	5. Baristand Industri Medan
6. Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta	6. Balai Diklat Industri Yogyakarta
7. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo	7. Balai Diklat Industri Makassar
8. SMK-SMTI Yogyakarta	8. Balai Besar Keramik Bandung
9. Baristand Industri Samarinda	9. Politeknik AKA Bogor
10. Balai Diklat Industri Surabaya	10. SMK-SMTI Bandar Lampung
11. Politeknik ATI Padang	11. Baristand Industri Ambon
12. Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta	12. Balai Diklat Industri Denpasar
13. Baristand Industri Pontianak	13. Balai Diklat Industri Jakarta
14. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung	14. Balai Besar Industri Agro Bogor
	15. Balai Besar Logam dan Mesin Bandung
	16. Politeknik STMI Jakarta
	17. SMTI Makassar

- b) Koordinasi persiapan LKE Satker yang diusulkan WBK/WBBM kepada KemenPAN RB dan submit unit menuju WBK/WBBM di aplikasi MenPAN RB;
- c) Kegiatan Penyusunan Berita Acara dan Laporan kegiatan penilaian ZI tahun 2021 masih dalam proses penyusunan;
- d) Koordinasi Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Kementerian Perindustrian pada Periode B09 selesai dilaksanakan;
- e) Laporan Analisa Hasil Pengawasan Monev IOMKI;
- f) Survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan Zona Integritas.

8. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang telah dilaksanakan selama Triwulan III (Juli-September 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi penerimaan CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2021;
- b. Koordinasi penyusunan formasi perencana dan penyusunan perhitungan formasi perencana pertama, muda, madya dan utama di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. Pelantikan auditor pertama a.n. Indra Irwan, Gun gun Gumilar, Elizabeth Frycillya A, Noer Dwi Rizkia P;
- d. Penyusunan rekapitulasi LPAK (Lembar Pengajuan Angka Kredit) Auditor;
- e. Reviu 18 SOP Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
- f. Koordinasi terkait penataan pegawai untuk Draft Permenperin Koordinator dan Subkoordinator;
- g. Koordinasi dan Sosialisasi pemutakhiran data mandiri SAP BKN dengan Biro OSDM di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- h. Sosialisasi evaluasi dan penyusunan gugus tugas jabatan fungsional auditor Inspektorat Jenderal TA 2022;
- i. Koordinasi pendaftaran peserta pada konferensi nasional IIA;
- j. Koordinasi pergantian rekening payroll pegawai Inspektorat Jenderal dari BNI ke BRI;
- k. Penyusunan Surat Pemanggilan, ST Pemeriksaan, Berita acara pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin;
- l. Perhitungan formasi JFA Sekretariat Inspektorat Jenderal dan konsultasi dengan BPKP.

- m. Telah dilaksanakan sebanyak 7 diklat substansi yang telah diikuti oleh auditor, antara lain:
- 1) Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
 - 2) Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
 - 3) Diklat Program Sertifikasi Auditor Forensik (CFrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - 4) Pelatihan dan Sertifikasi CGAA Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - 5) Pelatihan dan Sertifikasi CRMO Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - 6) Webinar Risk Management Based On ISO 31000: 2018;
 - 7) Webinar *Professional Risk Management Training Certification*.
- n. Dari 7 Diklat substansi pengawasan diatas, yang telah dilakukan PKS di lingkungan Inspektorat Jenderal ada 4, yaitu:
- 1) Penilaian Mandiri SPIP/MRI;
 - 2) PKS penilaian SAKIP tahun 2020;
 - 3) PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP; dan
 - 4) PKS Overview Manajemen Resiko Indeks.

Dari poin m dan n diatas, dapat diperoleh hasil capaian Indikator kinerja pada renstra Inspektorat Jenderal "*Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan" sampai dengan Triwulan III mencapai 57,1%. Perhitungan capaian diperoleh dari pelaksanaan PKS sebanyak 4 PKS dibagi dengan 7 diklat substansi yang telah diikutsertakan oleh Auditor dikali dengan 100.

9. Pengelolaan Keuangan

Kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan selama Triwulan III (Juli-September 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan yang rutin setiap bulan;
- b. Pelaporan capaian output ke KPPN;

- c. Koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan;
- d. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;
- e. Koordinasi dengan Biro Keuangan terkait Sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN;
- f. Penyusunan Laporan Perbendaharaan rutin setiap bulan
- g. Penyusunan Laporan Barang dan Jasa Semester I Tahun 2021

10. Pelaksanaan PKPT s.d. Triwulan III

PKPT merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Jenderal serta sebagai dasar untuk menilai kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

PKPT yang dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen evaluasi adalah PKPT awal yang diserahkan oleh masing-masing Inspektorat pada akhir tahun 2020 lalu.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada masing-masing Inspektorat belum sesuai dengan perencanaan atau PKPT awal, dikarenakan perbedaan timeframe dan terdapat pula kegiatan yang tidak dicantumkan di dalam dokumen PKPT.

Pada Inspektorat I, Kegiatan yang sesuai dengan dokumen PKPT ialah Reviu LK-BMN Setjen yang mulai dilakukan di pertengahan bulan Juli sampai dengan bulan agustus 2021. Kegiatan lain yang telah dijadwalkan seperti Reviu RKA-K/L BPSDMI dan Audit Poltek Morowali tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kegiatan lainnya adalah kegiatan Non PKPT (kegiatan sesuai arahan dari pimpinan) pengawasan dan pengawalan Implementasi Instruksi Menteri No 1 tahun 2021 dan pelaksanaan Desk Reviu kegiatan beresiko (konstruksi, mesin/peralatan, diklat 3 in 1, pengadaan tanah dan jasa konsultasi). Sedangkan di bulan Agustus, Kegiatan yang sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan adalah reviu LKBMN BPSDMI. Kegiatan yang direncanakan, namun tidak terealisasi adalah penilaian MRI yang rencananya akan dilaksanakan di bulan berikutnya. Kegiatan Non PKPT yang dilaksanakan adalah pengawasan progress

pembangunan gedung AKOM Solo, reviu revisi anggaran pada BPSDMI dan peran APIP K/L dalam pengawasan atas perencanaan dan penganggaran. Kegiatan Inspektorat I di bulan September adalah melanjutkan kegiatan pengawasan yang dilakukan di bulan selanjutnya. Selain itu juga terlaksana kegiatan non PKPT seperti monitoring bantuan masker pada BPSDMI, mengikuti layanan konsultasi (Coaching Clinic secara online), pengawasan seleksi tes CPNS di Lingkungan Kemenperin.

Kegiatan pengawasan Inspektorat II pada Triwulan III yang sesuai dengan jadwal yang direncanakan di dokumen PKPT adalah audit Dana dekonsentrasi dan Reviu LK-BMN Ditjen ILMATE dan IKMA. Sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah Reviu RKA-K/L dan kegiatan Non PKPT seperti pengawasan pelaksanaan IOMKI dan pemenuhan kebutuhan oksigen pada masa PPKM darurat, Pengawasan ketersediaan oksigen medis dan kegiatan-kegiatan sesuai arahan pimpinan lainnya. Sedangkan di bulan agustus, kegiatan yang direncanakan di PKPT sama seperti yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya kegiatan yang direncanakan di PKPT tetapi juga kegiatan lain seperti pengawasan pengadaan CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan Kemenperin, Penyelesaian Permohonan Tanggapan Terhadap Draft Perjanjian Hibah CEIR, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Dekonsentrasi Pada Disperindag Provinsi NTT, Koordinasi Pemantauan IOMKI dan Evaluasi Harga Gas Bumi Tertentu pada PT Krakatau Steel dan keikutsertaan dalam rapat-rapat terkait kegiatan pengawasan.

Pada Inspektorat III, pada bulan Juli yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal PKPT adalah Reviu RKA-K/L dan Reviu LK-BMN Satker Cakupan tugas IR III. Reviu RKA-K/L yang dilaksanakan terkait pemotongan anggaran dalam rangka pemberian bantuan oksigen, tabung oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator dan oksigen generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional BSKJI (Beserta Unit Vertikalnya), Itjen dan Pusdatin. Kegiatan Reviu RK-BMN yang seharusnya juga dilaksanakan di bulan Juli, sebagian telah dilaksanakan di bulan Juni. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan non PKPT (Sesuai arahan pimpinan) seperti Monitoring dan pengawalan implementasi IOMKI pada satker Pusdatin, Pengawasan dan Pengawalan pada perusahaan Industri dalam rangka pemantauan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 guna penyediaan bantuan oksigen dalam masa kedaruratan Covid-19, dsb. Sedangkan kegiatan Inspektorat III dibulan agustus yang sesuai dengan rencana

PKPT adalah kegiatan pengawalan yang dilaksanakan terkait Implementasi IOMKI pada Satker BSKJI dan Pusdatin, pengawalan SPPT-SNI pada unit pelaksana teknis BSKJI. Kegiatan lain yang terlaksana tidak sesuai dengan PKPT, yaitu Reviu RKA-KL pagu indikatif 2022 Inspektorat Jenderal dan Reviu LKBMN Semester I TA 2021 pada BSI, BBKK, BBIA, Baristand Padang, Baristand Bandar Lampung, BBIHP Makassar, Baristand Medan, Baristand Samarinda, Baristand Ambon dan Baristand Manado. Kegiatan pengawasan Inspektorat III di bulan September di dokumen PKPT adalah kegiatan Pengawalan dan Consulting satker cakupan tugas Inspektorat III. Kegiatan pengawasan di bulan September telah sesuai dengan PKPT.

Kegiatan Inspektorat IV, pada bulan Juli 2021 yang sesuai dengan jadwal PKPT adalah Reviu LK Ditjen IA, IKFT dan KPAIL, Reviu Laporan Keuangan dan BMN Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kegiatan yang telah direncanakan di bulan Juli seperti pemutakhiran peta resiko 2021 dan pendampingan penyusunan peta risiko satker cakupan tugas IR IV tidak dilaksanakan. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan di bulan Juli adalah Reviu revisi realokasi pagu TA 2021 Ditjen KPAIL, Reviu RKA-K/L Ditjen IA dan Ditjen KPAIL, Reviu Usulan RKA-K/L berdasarkan Pagu Indikatif TA 2020 Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kegiatan lainnya adalah kegiatan non PKPT seperti Pengawasan dan pengawalan Industri Oxygen Kesehatan Covid-19, Pengawalan penerbitan dan pelaksanaan IOMKI serta penyediaan oksigen medis selama PPKM darurat pada satker cakupan tugas Inspektorat IV, Pemantauan vaksinasi Industri dan implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021 (IOMKI) Ditjen Industri Agro. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat IV di bulan Agustus 2021 yang sesuai dengan rencana PKPT ialah kegiatan revisi DIPA dan kegiatan pengawalan. Kegiatan lain yang terlaksana ialah kegiatan Non PKPT seperti Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan mesin dan/atau peralatan pembuatan obat tradisional (hibah mesin/peralatan dalam rangka revitalisasi industri obat tradisional TA 2020), Pemantauan Implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021 (IOMKI) dan kesiapan Industri menghadapi Pandemi Ditjen Industri Agro di PT Sampoerna. Kegiatan pengawasan Inspektorat IV di bulan September 2021 menurut PKPT adalah audit kinerja Pusat P3DN, Audit kegiatan beresiko tinggi 2021 dan Audit reviu pagu alokasi 2022. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di bulan September 2021 sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pengawasan Inspektorat IV

sesuai dengan PKPT. Kegiatan lain yang terlaksana ialah kegiatan Non PKPT. Kegiatan tersebut adalah Pengawasan program restrukturisasi mesin/peralatan pada industri penyempurnaan kain dan industri percetakan kain sesuai permenperin no 18 tahun 2021, Penilaian Kembali BMN di pabrik gula PT Perkebunan Nusantara II Deli Serdang, Pengawasan dan pelaksanaan program kegiatan Direktorat ASDIPI Tahun 2021, Pengawasan pemetaan kebutuhan garam industry selain dari impor, Pengawasan verifikasi kebutuhan bahan baku jagung dalam industry makanan, Penyusunan RSNI Sistem Harmonisasi Global Ditjen IKFT, Penilaian BMN PMPP Ditjen Industri Agro di Takalar Sulsel.

Dapat disimpulkan, bahwa tidak semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen PKPT sebagian besar karena dari segi waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi serta juga disesuaikan dengan arahan dari pimpinan masing-masing eselon II Inspektorat Jenderal.

Adapun progres capaian dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Triwulan III diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Progres Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal pada TW III

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.4%	BPK telah Me-release hasil pemeriksaan sbg berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2020: Rp 1,975,729,108,365 ✓ Temuan BPK: Rp 653,625,627.60 ✓ maka, batas toleransi temuan= temuan BPK /realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2020 jadi, batas toleransi temuan material: 0.033% 	
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Hingga 30 September 2021, jumlah total rekomendasi yaitu 610, dan hingga saat ini belum ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. (Data masih dapat berubah sewaktu-waktu karena masih dalam proses pelaksanaan)	
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	Berdasarkan laporan klinik pada tanggal 27 September 2021, dengan nota dinas nomor 06/IJ-IND.1/KK/IX/2021, seluruh laporan dumas yang masuk tidak berkadar pengawasan. Jadi, realisasi masih Nihil	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	91.5%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hingga bulan September 2021, Total Rekomendasi seluruh satker: 610 ✓ Rekomendasi yg telah sesuai: 238 ✓ Rekomendasi yg belum sesuai: 71 ✓ Maka realisasi indikator kinerja ini hingga Sept 2021 yaitu : $(238+71)/610 = 51\%$ (Data masih dapat berubah sewaktu-waktu karena masih dalam proses pelaksanaan) 	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil PMPRB pada tanggal 17 Juni 2021 telah diperoleh, indikator kinerja telah tercapai. ✓ Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB ✓ $(5.61/6.25)*100\%=89.76\%$ 	
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Telah dilaksanakan sosialisasi penilaian MRI yang terintegrasi pada tanggal 30 Juni 2021, telah dibentuk tim penilai, pembangun & penjamin kualitas. Saat ini masih dalam proses pelaksanaan	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal secara online akan diadakan pada Bulan November 2021	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian SAKIP Eselon I & II telah selesai dilaksanakan, hasil A hanya diperoleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Inspektorat I,II, III, dan IV memperoleh nilai BB. ✓ Penyusunan/ Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-A masih dalam tahap pelaksanaan. ✓ Penilaian tahun ini menggunakan metode <i>self-assessment</i> yang pelaksanaannya belum dilaksanakan di Triwulan III. 	
		3. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	Pengadaan Laptop dan tablet telah dilaksanakan	
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan	25%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sistem informasi pengawasan dalam tahap pengembangan - Pengembangan informasi Inspektorat Jenderal melalui media sosial (Instagram dan media massa 	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
		oleh auditor		online)	
		2. Penyusunan Pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%	- Beberapa pedoman masih dalam proses penyelesaian; - Pada Bulan Juli 2021, 18 SOP Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi telah di reviu; - Pada Bulan Agustus 2021, Penyusunan konsep SOP PTLHP dengan menyesuaikan pada peraturan Inspektur Jenderal Nomor 176 Tahun 2019 (SOP Terakhir belum relevan dengan perirjen).	
		3. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	IR I, III, dan IV: belum dilakukan pengukuran IR II: realisasi 80% , terdapat 20 kegiatan dari 25 kegiatan yang telah sesuai dengan PKPT	
		4. Tingkat Perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%	Sampai dengan TW III, perolehan data dan informasi pengawasan dapat diperoleh sebesar 100%. Perolehan data dan informasi pengawasan di tahun 2021 dilakukan melalui E-pesan dan media <i>Whatsapp</i>	
		5. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat. Berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian, Kesesuaian Peran pengawasan Auditor dengan sertifikasi terakhir yang dimiliki telah sesuai 100%	
		6. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen telah mencapai target, yaitu 91% Cara hitung: nilai RB Itjen (komponen pengungkit) = 33,03 dari total nilai 36,3. maka: $33,02/36,3 = 0,91 * 100\% = 91\%$	
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	PKS yang telah dilaksanakan adalah 4 Pelatihan (Januari-September), dari 7 diklat substansi yg telah diikuti sertakan. Maka Capaian hingga September 2021: $4/7 * 100\% = 57.1\%$	
		2. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Hingga September 2021, terdapat 56 orang pegawai yang mendapatkan diklat kompetensi dari total 106 APIP. $56/106 * 100\% = 53\%$	
		3. Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	92%	Telah disediakan informasi tentang hukum yang dapat diakses melalui <i>hukumonline.com</i> serta pencetakan informasi hukum dan referensi pengawasan. Hingga September 2021, berdasarkan	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
				Laporan Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi, belum ada pelanggaran kode etik auditor.	
		4. Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	- Layanan rutin bulanan - Laporan rutin perbendaharaan - Laporan LK dan BMN setiap semester - Gaji dan tunjangan tiap bulan	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan

III.3. Hambatan dan Kendala

Pada Triwulan III Tahun 2021, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat hambatan dan kendala, antara lain:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal pada Triwulan III telah berjalan dengan lancar tidak mengalami kendala yang berarti. Namun, dengan adanya *new normal*, kegiatan pengawasan mengalami perubahan jadwal pelaksanaan agar realisasi anggaran bisa optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Pemotongan anggaran yang cukup signifikan dari Triwulan II ke Triwulan III, yaitu sebesar Rp 4,998,283,000,- yang mengharuskan masing-masing unit per Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal merancang ulang kegiatan.
- 3) Adanya perubahan struktur organisasi yang sudah diberlakukan di Triwulan II dan juga perubahan formasi pegawai di Triwulan III mengakibatkan kurang optimalnya pendelegasian tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan;
- 4) Kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal, belum didukung oleh media yang memadai seperti aplikasi yang dapat menyimpan bukti dukung tindak lanjut agar lebih mudah menginventarisir dan lebih mudah dikoordinasikan dengan ketua tim auditor yang memeriksa;
- 5) Masih ada beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya revisi kegiatan dan anggaran.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III ini Inspektorat Jenderal mengupayakan peningkatan kerjasama yang sinergis sebagai berikut :

1. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar pelaksanaan dan realisasi optimal.
2. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik online maupun secara langsung/tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan agar mengoptimalkan kegiatan pada triwulan IV;

4. Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal agar memaksimalkan kebijakan *work from home* maupun *work from office* dalam pelaksanaan penugasan;
5. Koordinasi antara Inspektorat dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal diharapkan dapat meningkat sehingga kinerja pengawasan dan dukungannya dapat berjalan dengan optimal.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan III Tahun 2021 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 (Januari-September) mencapai Rp 22,124,421,028, - atau 68.43 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 32,332,974,000,-. Angka-angka capaian kinerja kegiatan tersebut merupakan nilai tertimbang dari kemampuan penyerapan anggaran dari total anggaran yang ada pada Inspektorat Jenderal. Namun, realisasi ini tidak dapat terukur secara *real time* pada aplikasi PP39 dan Monev Perkin di dalam Intranet, karena terdapat perbedaan *cut-off data* yang menimbulkan perbedaan kalkulasi data yang signifikan dan permasalahan ini perlu di perbaiki di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran masih ada yang belum dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan pelaksanaan, dan masih terus dioptimalkan kegiatan pada indikator kinerja terkait agar dapat tercapai pada triwulan berikutnya.

Untuk selanjutnya perlu koordinasi internal maupun eksternal untuk menjamin realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan target.

Informasi capaian kinerja Triwulan III ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal TA 2021 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN



Kegiatan Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. S1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,4 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%	70%	100 Persen
Pagu = Rp. 6.933.709.000													
S1.2 - Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	40%	90 Persen
Pagu = Rp. 366.898.000													
S1.3 - Pengaduan masyarakat berkadat pengawasan yang ditindaklanjuti	85 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	25%	0,1 Persen
Pagu = Rp. 322.858.000													
S1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91,5 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	26%	62 Persen
Pagu = Rp. 8.433.342.000													
Total Pagu = Rp. 16.056.807.000													
2. S2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
S2.1 - Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	40%	100 Persen
Pagu = Rp. 292.934.000													
S2.2 - Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	1 Level
Pagu = Rp. 119.890.000													
Total Pagu = Rp. 412.824.000													
3. S3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif													
S3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%	27%	0 Persen
Pagu = Rp. 1.299.974.000													
S3.2 - Capaian IACM Itjen	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	60%	0 Level
Pagu = Rp. 1.218.895.000													
S3.3 - Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0 Persen
Pagu = Rp. 647.540.000													
Total Pagu = Rp. 3.166.409.000													
4. S4 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien													
S4.1 - Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	56%	75 Persen
Pagu = Rp. 44.160.000													
S4.2 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	15%	85 Persen
Pagu = Rp. 28.400.000													
S4.4 - Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0 Persen
Pagu = Rp. 11.036.000													
S4.3 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	56%	0 Persen
Pagu = Rp. 1.147.208.000													
S4.5 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	23%	0 Persen
Pagu = Rp. 42.448.000													
S4.6 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	25%	0 Persen
Pagu = Rp. 16.050.000													
Total Pagu = Rp. 1.289.302.000													
5. S5 - Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas													
S5.1 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%	66%	0 Persen
Pagu = Rp. 79.400.000													
S5.2 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	17%	0 Persen
Pagu = Rp. 13.000.000													
S5.3 - Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	23%	0 Persen
Pagu = Rp. 9.400.000													
S5.4 - Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68%	71%	0 Bulan Layanan
Pagu = Rp. 23.512.049.000													
Total Pagu = Rp. 23.613.849.000													